

Analisis Wacana Kritis Politik Oligarki dalam *Podcast Bocor Alus Politik "Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid"* YouTube Tempo.co

Lailatul Magfiroh¹, Heidy Arviani^{2*}

^{1,2*} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

article info

Article history:

Received 10 November 2025

Received in revised form

20 December 2025

Accepted 10 January 2026

Available online July 2026.

Keywords:

Oligarchy; Oil And Gas

Governance; Critical

Discourse Analysis.

Kata Kunci:

Oligarki; Migas; Analisis

Wacana Kritis.

abstract

This study examines oligarchic political discourse in Tempo.co's Bocor Alus Politik podcast episode "Pertamina and Riza Chalid's Political Network." It investigates how political-economic power relations are represented in media narratives when discussing Indonesia's energy governance, particularly regarding fuel imports, policy "conditioning," and elite networks. The research employs a descriptive qualitative design and Teun A. van Dijk's Critical Discourse Analysis framework, focusing on the dimensions of text, social cognition, and social context. The findings show that the podcast constructs oligarchy as a mode of power operating beyond formal state institutions through interconnected political and business actors that mutually reinforce protection and access. Riza Chalid is framed not merely as a businessman but as an informal political actor perceived to influence national energy policy and the distribution of rents. Evaluative lexical choices such as "Gasoline Godfather," "old modus," and the metaphor "out of the tiger's mouth into the crocodile's jaws" function to sharpen criticism that the issue is not reducible to individual wrongdoing, but rooted in structural continuity and the reproduction of networks. These results align with Jeffrey A. Winters's concept of oligarchy as income defense, in which political power is used to secure wealth accumulation and protection by a narrow elite. Practically, the podcast as a digital platform operates as a space of counter-discourse, expanding public understanding of the nexus between media, power, and energy politics.

abstrak

Penelitian ini menganalisis wacana politik oligarki dalam podcast Bocor Alus Politik Tempo.co episode "Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid". Fokus kajian adalah bagaimana relasi kuasa politik-ekonomi direpresentasikan dalam narasi media ketika membahas tata kelola energi Indonesia, khususnya pada isu impor migas, pengondisian kebijakan, dan jejaring elite. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk yang mencakup dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast mengonstruksi oligarki sebagai mekanisme kekuasaan yang bekerja di luar institusi formal melalui jaringan aktor politik dan ekonomi yang saling melindungi. Riza Chalid diposisikan bukan hanya sebagai pengusaha, melainkan sebagai aktor politik nonformal yang dipersepsikan memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan energi dan distribusi rente. Pilihan diksi evaluatif seperti "Gasoline Godfather", "modus lama", dan metafora "mulut harimau masuk mulut buaya" berfungsi menegaskan kritik bahwa problem tidak berhenti pada pelaku individual, melainkan pada struktur dan regenerasi jaringan. Temuan ini sejalan dengan konsep oligarki Jeffrey A. Winters tentang income defense, yakni penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan akumulasi dan perlindungan kekayaan oleh segelintir elite. Secara praktis, podcast digital tampil sebagai ruang counter-discourse yang memperluas literasi publik mengenai hubungan media, kekuasaan, dan politik energi.

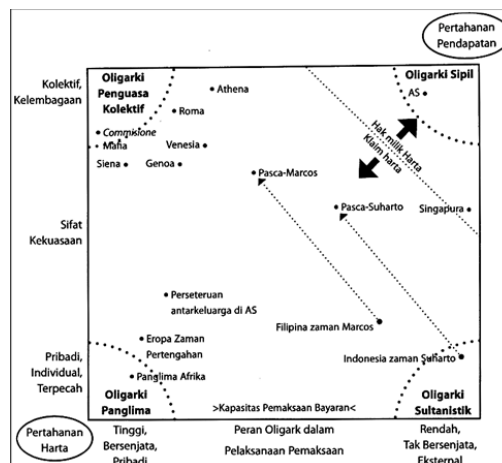
Corresponding Author. Email: heidy_arviani.ilkom@upnjatim.ac.id ^{2}.

1. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia kerap dipahami sebagai persoalan struktural yang menjalar ke banyak sektor, termasuk energi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan persoalan tersebut masih memerlukan perhatian serius (Nurrohmah & Setiawati, 2025). Penilaian serupa tampak pada *Rule of Law Index* 2021 yang menempatkan Indonesia pada posisi mengkhawatirkan dalam indikator kebebasan dari korupsi (CNNIndonesia, 2021). Pandangan publik menguatkan kondisi tersebut. Sebanyak 92% warga Indonesia menilai korupsi di pemerintahan sebagai masalah serius (Anandya *et al.*, 2022). Angka itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa agenda antikorupsi belum menghasilkan perubahan yang dirasakan luas. Pada praktiknya, korupsi juga kerap melibatkan pengusaha dan elite politik yang berkepentingan atas pengelolaan sumber daya alam. Pola relasi tersebut beririsan dengan politik oligarki, ketika sekelompok kecil aktor mempertahankan pengaruh melalui kepemilikan harta dan jaringan (Yusri & Ingan Mahuli, 2023). Salah satu kasus yang menyita perhatian ialah dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023 dengan estimasi kerugian Rp193,7 triliun (Kompas.com, 2025).

Pemberitaan turut mengaitkan perkara tersebut dengan Muhammad Riza Chalid yang kerap dijuluki “saudagar minyak”, beserta jejaring politik nonformal di sekelilingnya (voi.id, 2025). Untuk membaca dinamika tersebut, konsep kekuasaan menjadi pijakan awal. Kekuasaan dapat dipahami sebagai kapasitas individu atau kelompok untuk memengaruhi pihak lain, yang jejaknya dapat ditelusuri melalui jangkauan pengaruh, lamanya dominasi, serta penguasaan sumber daya material (Risvandi & Andri, 2022). Dalam bingkai tersebut, kasus Pertamina tidak cukup dilihat sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai gejala kerja jejaring oligarkis yang menghubungkan kepentingan ekonomi dan politik. Jeffrey A. Winters mendefinisikan oligarki sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir individu sangat kaya untuk menjaga dan melindungi kekayaan mereka (*income defense*) melalui kendali atas jalur kebijakan publik (Winters, 2011). Kerangka ini relevan untuk menilai bagaimana relasi kekayaan, akses politik, dan

perlindungan institusional dapat saling menguatkan dalam perkara tata kelola energi.



Gambar 1. Tipologi Oligarki (Sumber Buku Oligarki karya Jeffrey A. Winters)

Dari tipologi Winters tampak dua sumbu analitis. Sumbu pertama menunjukkan sejauh mana oligark terlibat langsung dalam penggunaan kekerasan untuk mempertahankan kekayaan; sumbu kedua membedakan apakah kekuasaan dijalankan secara individual atau melalui koordinasi kolektif. Kombinasi kedua sumbu tersebut menghasilkan empat tipe ideal: *warring oligarchy* (oligarki panglima), *ruling oligarchy* (oligarki penguasa kolektif), *sultanistic oligarchy* (oligarki sultanistik), dan *civil oligarchy* (oligarki sipil). Kerangka ini dipakai untuk membaca kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina dan jejaring politik Riza Chalid, terutama karena kejatuhan Orde Baru tidak mengakhiri oligarki, melainkan mengubah cara kerjanya dan saluran pengaruhnya (Winters, 2011). Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk efektif untuk mengurai ideologi dan relasi kuasa dalam pemberitaan daring terkait korupsi maupun kebijakan publik (Alifia & Widyaningsih, 2023; Ella *et al.*, 2024; Kusumawati & Yasin, 2021; Nurul & Solikhin, 2023). Meski demikian, fokus kajian masih didominasi teks berita, sementara produksi wacana dalam format sinier investigatif belum banyak dibaca dengan perangkat analitis yang sama. Celah penelitian terletak pada belum kuatnya kajian AWK terhadap wacana oligarki yang diproduksi melalui podcast investigatif di media baru, seperti *Bocor Alus Politik* Tempo.co (Tutiasri *et al.*, 2020). Padahal, format podcast memiliki ciri wacana yang berbeda dari berita tertulis:

argumen dibangun melalui dialog, penekanan intonasi, pemilihan metafora, serta strategi penceritaan yang dapat membentuk penilaian audiens terhadap aktor, institusi, dan peristiwa. Berangkat dari celah tersebut, penelitian diarahkan untuk menelaah konstruksi wacana politik oligarki dalam episode “Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid” pada kanal YouTube Tempo.co dengan pendekatan kualitatif dan metode AWK Teun A. van Dijk.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-interpretatif untuk menafsirkan pembentukan wacana dan makna yang dilekatkan pada isu oligarki dalam produk media. Pilihan ini sesuai untuk membaca praktik komunikasi politik serta cara ideologi bekerja melalui bahasa dan penceritaan (Creswell, 2013). Korpus penelitian berupa narasi pada episode *Bocor Alus Politik* Tempo.co yang tayang 8 Maret 2025 dan membahas kasus Pertamina serta jejaring politik Riza Chalid. Objek analisis ialah wacana politik oligarki yang tampak melalui pilihan diksi, susunan narasi, dan strategi penekanan dalam tayangan. Data sekunder meliputi artikel berita, unggahan media sosial, serta tayangan dari kanal YouTube lain yang relevan; seluruhnya dipakai untuk memeriksa konsistensi informasi dan mendukung triangulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik: dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi mencakup pengaksesan video, transkripsi penuh episode, pengambilan tangkapan layar pada bagian yang relevan, serta pencatatan komentar audiens sebagai respons wacana. Rentang kerja penelitian ditetapkan pada 1 Februari–31 Oktober 2025 untuk menjaga keterlacakan proses dan stabilitas pengelolaan data. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat pijakan teoretis, terutama terkait Analisis Wacana Kritis (AWK) Teun A. van Dijk. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi dilakukan dengan memilih bagian transkrip yang paling menunjukkan pola representasi aktor, relasi kuasa, dan perangkat bahasa yang dipakai. Pada tahap penyajian, kutipan disusun ke dalam kategori analisis, kemudian ditarik

kesimpulan yang diuji kembali melalui pemeriksaan ulang data. Kategorisasi mengacu pada tiga dimensi AWK Van Dijk: (1) struktur teks (makrostruktur, superstruktur, mikrostruktur), (2) kognisi sosial yang mencakup skema pengetahuan, proses mental, dan ideologi produsen wacana, serta (3) kondisi sosial berupa faktor politik-budaya yang melingkupi produksi dan penerimaan wacana (Simanjuntak & Kahija, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Bocor Alus Politik merupakan program siniar video produksi Tempo Media Group sejak 20 Mei 2023. Program ini tayang mingguan setiap Sabtu dengan durasi sekitar 30–60 menit, dipandu jurnalis desk politik Tempo. Format acara menitikberatkan pada pembacaan temuan liputan investigatif, pengalaman reporter, serta pembahasan relasi kuasa yang bekerja di balik peristiwa politik. Dari sisi jangkauan, sejumlah episode mencapai jutaan penonton dan memperoleh pengakuan profesional, antara lain Spotify Wrapped Live Indonesia 2023 serta penghargaan Pantau dan AJI 2024 (Nugroho, 2024). Sejumlah kajian menilai program relatif berorientasi data, meski variasi narasumber masih dapat diperluas agar sudut pandang tidak terlalu bertumpu pada lingkaran redaksional tertentu. Terlepas dari catatan tersebut, *Bocor Alus Politik* berfungsi sebagai ruang alternatif bagi publik untuk menilai politik Indonesia melalui gaya tutur yang ringan, tetapi tegas ketika menautkan bisnis, institusi negara, dan jaringan kekuasaan. Salah satu episode membahas dugaan praktik oligarki migas yang melibatkan Pertamina serta jejaring Riza Chalid. Pada episode tersebut, Riza diposisikan sebagai broker minyak lintas rezim dengan relasi politik yang kuat dan dipotret sukar dijangkau oleh penegakan hukum. Narasi episode menegaskan bahwa problem di Pertamina tidak berhenti pada urusan prosedural, melainkan berkaitan dengan kerja jaringan informal yang memengaruhi skema impor dan mekanisme tender. Melalui kemasan investigatif, program mendorong publik menilai ulang isu transparansi, pengawasan, dan peran media dalam menguji praktik kekuasaan yang merugikan negara.

Penyajian Data dan Analisis Data Dimensi Teks

Berdasarkan hasil analisis, struktur dialog para narasumber (Raymundus Rikang, Erwan Hermawan, Fajar Pebrianto) membentuk narasi mengenai dugaan keterlibatan pelaku usaha migas dalam pengaturan impor melalui pengaruh terhadap struktur internal Pertamina. Gagasan yang berulang “modus lama” dan “pergantian pemain” berfungsi sebagai penanda bahwa praktik yang dibicarakan dipahami sebagai pola yang menetap, sementara aktor dapat berganti di dalam lingkaran elite ekonomi-politik.



Gambar 2. Thumbnail Youtube Podcast Bocor Alus Politik Episode Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid

Pada bagian pembuka (01:15–02:56), percakapan dibangun dengan gaya santai, tetapi sejak awal mengunci isu melalui penyebutan “liga korupsi” pada anak usaha Pertamina Patra Niaga. Pada segmen ini host juga menyebut Riza Chalid ketika menyatakan bahwa “anaknya menjadi tersangka dalam kasus ini” (Bagian Pembuka 01:15–02:56). Struktur pembuka semacam ini bekerja sebagai *framing* awal: audiens diarahkan untuk membaca kasus sebagai persoalan serius dan terorganisasi, bukan sekadar pelanggaran prosedural. Pada bagian pengantar “pergantian pemain” (02:57–06:24), Fajar menggunakan label “Gasoline Godfather” untuk merujuk Riza Chalid. Penyebutan ini bersifat evaluatif dan menandai posisi Riza sebagai figur yang dipersepsikan melampaui pergantian rezim. Narasi juga menegaskan bahwa nama Riza tidak muncul langsung dalam dokumen, namun perusahaan yang dikaitkan dengan anaknya (Kerry) dipotret sebagai pelaksana yang memperoleh keuntungan dari skema impor yang telah

“dikondisikan” (Bagian Pengantar Kasus 02:57–06:24). Dengan demikian, episode membangun perbedaan antara aktor “tidak kasat dokumen” (figur puncak) dan aktor operasional (pelaksana/eksekutor) untuk menegaskan cara kerja jaringan informal. Pada bagian skema aksi (06:25–08:45), narasumber menyampaikan bahwa kapasitas kilang domestik “dikondisikan” agar tidak menyerap *crude oil* secara maksimal sehingga impor tampil sebagai konsekuensi yang seolah logis. Pada titik impor inilah Kerry disebut memperoleh margin 13–15% dari *shipping* (Bagian Skema Aksi 06:25–08:45). Struktur penjelasan dibangun secara kausal (kilang–impor–keuntungan), yang memperjelas logika rente dalam narasi. Pada bagian manipulasi impor (08:46–11:15), proses tender digambarkan “seolah formalitas” karena keputusan kunci dinarasikan sudah ditentukan melalui rapat internal, sehingga impor menjadi satu-satunya opsi yang berjalan (Bagian Manipulasi Impor 08:46–11:15).

Di sini, episode menempatkan mekanisme formal (tender) sebagai *cover* bagi keputusan informal yang lebih menentukan. Pada bagian koneksi elit politik (11:16–14:35) hingga rekam jejak (14:35–17:42), host menautkan Riza Chalid dengan jejaring lintas era: keluarga Cendana, PAN/Hatta Rajasa, Setya Novanto, serta kasus Freeport “Papa Minta Saham”. Rangkaian rujukan ini memperluas bingkai kasus dari urusan teknis impor menjadi persoalan akumulasi pengaruh melalui modal politik yang panjang (Bagian Koneksi dengan Elit Politik 11:16–14:35). Pada bagian intervensi bisnis (17:42–19:38), narasi mengungkap retaknya relasi bisnis Riza dengan Prabowo terkait proyek kilang dan investor Rusia, serta klaim bahwa pada Pilpres 2024 ia tidak berada dalam lingkaran Prabowo (Bagian Intervensi Bisnis 17:42–19:38). Segmen ini menandai bahwa jejaring oligarkis tidak selalu stabil, melainkan dapat mengalami pergeseran aliansi. Pada bagian intrik politik (19:39–22:45), pesan figuratif “jangan sampai keluar mulut harimau masuk mulut buaya” digunakan untuk mengikat kembali tema “pergantian pemain” (Bagian Intrik Politik 19:39–22:45). Metafora tersebut berfungsi sebagai perangkat retorik yang menegaskan skeptisisme terhadap perubahan aktor yang tidak disertai perubahan struktur. Terakhir, pada bagian perlindungan elite (22:46–26:19), narasumber menyebut jejaring Riza menembus banyak partai dan mengaitkan meredupnya proses hukum “Papa Minta

Saham” dengan putusan MK terkait batasan alat bukti rekaman (Bagian Perlindungan Elite 22:46–26:19). Segmen penutup ini menegaskan isu proteksi politik sebagai prasyarat berfungsinya jaringan.

Dimensi Kognisi Sosial

Dalam dimensi kognisi sosial, wacana episode dapat dibaca sebagai produk pengetahuan liputan, pengalaman investigasi, dan orientasi ideologis jurnalis Tempo yang telah lama mengamati isu oligarki migas. Karena itu, kasus Pertamina tidak diperlakukan pada level teknis, melainkan langsung ditempatkan sebagai gejala struktur kuasa yang sistemik. Host dan narasumber menghubungkan data baru dengan pola yang dinilai berulang, sehingga kasus dibingkai sebagai fenomena struktural, bukan insidental. Artikel “Mengapa Kami Membuat Bocor Alus” (Tempo.co, 2023) menyatakan tujuan program untuk mempertahankan jurnalisme politik independen di tengah industri media yang makin komersial, dengan nilai yang dideklarasikan: demokrasi, keadilan, kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan pluralisme. Pernyataan ini menjadi petunjuk arah framing: fokus pada relasi kuasa, jaringan, dan dampak politik, bukan semata kronologi prosedural. Episode juga memanfaatkan *shared knowledge* memori kolektif audiens ketika host merujuk Orde Baru, Cendana, Petral, hingga “Papa Minta Saham” tanpa penjelasan panjang. Hal ini terlihat, misalnya, saat Erwan menuturkan rangkaian historis (“...sejak zaman Orde Baru... keluarga Cendana... ... Papa Minta Saham...”), yang mengandaikan audiens memiliki pengetahuan dasar tentang sejarah mafia migas. Dengan asumsi kesamaan pengetahuan, argumentasi menjadi lebih cepat “masuk” ke pola besar. Skema narasi yang berulang membentuk model mental sistemik: (1) kilang “dikondisikan” agar tidak menyerap maksimal, (2) impor diposisikan sebagai solusi yang tak terhindarkan, (3) aktor tertentu mengisi jalur impor, (4) rente/mark up berlangsung. Kutipan seperti “kita tuh punya minyak dan sengaja dikondisikan agar kilang kita itu tidak menyerap maksimal...” menguatkan cara pandang tersebut. Diksi evaluative “modus lama”, “pergantian pemain” menandai posisi kritis produsen wacana, sekaligus menunjukkan bahwa penangkapan individu tidak diposisikan sebagai jawaban final karena yang dikritik adalah mekanisme politik yang memungkinkan pola itu

bertahan. Pesan figuratif dari segmen JAMPIDSUS (“keluar mulut harimau masuk mulut buaya”) mempertegas gagasan bahwa pergantian tokoh tidak identik dengan reformasi. Latar profesional narasumber (editor dan jurnalis investigasi) turut memengaruhi kedalaman argumentasi dan pilihan kata. Dengan pengalaman peliputan panjang, mereka cenderung menafsirkan peristiwa sebagai pola yang berulang dan terorganisasi, bukan deviasi sesaat.

Dimensi Konteks Sosial

Pada konteks sosial, episode diletakkan dalam lanskap politik-ekonomi migas Indonesia yang sejak lama dipersepsikan rentan praktik rente. Pernyataan Mahfud MD mengenai “mafia migas” memberi rujukan bahwa jejaring elite dapat bertahan lintas era karena pembenahan struktural tidak berjalan memadai (Raditya, 2019). Dalam kerangka ini, oligarki migas dipahami bukan sebagai kejadian baru, melainkan kelanjutan dari sejarah relasi dekat antara aktor ekonomi dan pusat kekuasaan sejak Orde Baru, yang kemudian beradaptasi pada demokrasi elektoral melalui patronase, jaringan lintas partai, dan transaksi politik. Analisis wacana episode memperlihatkan tegangan antara negara sebagai penegak hukum secara formal dan persepsi publik bahwa aktor ekonomi-politik besar tetap menentukan arah permainan. Podcast sebagai medium digital memperluas sirkulasi kritik dengan mengubah temuan investigatif menjadi argumen populer yang dapat diakses audiens nonspesialis. Konsekuensinya, relasi negara–oligarki diperdebatkan secara lebih terbuka di ruang publik, terutama terkait tata kelola BUMN energi, transparansi, dan stabilitas reformasi (Purnomo, 2025). Di ruang media, tampak perbedaan gaya framing. Media arus utama cenderung menekankan data, prosedur hukum, dan kronologi; sementara kanal-kanal alternatif dan akun media sosial sering tampil lebih frontal dan populistik, menggabungkan rujukan formal (rapat DPR, regulasi, angka kerugian) dengan sentimen ketidakadilan. Kontestasi ini menunjukkan perebutan legitimasi: pihak mana yang dianggap berwenang mendefinisikan “kebenaran” dan “masalah utama” dalam kasus migas. Respons audiens, termasuk komentar pada YouTube *Bocor Alus Politik*, memperlihatkan skeptisisme terhadap penegakan hukum dan penekanan bahwa persoalan berada pada jaringan dan proteksi, bukan hanya pada individu. Komentar publik dapat dibaca sebagai

bentuk resistensi wacana terhadap dominasi oligarkis: warganet tidak sekadar bereaksi emosional, tetapi juga menyusun kritik terhadap relasi kuasa yang dianggap mereproduksi korupsi secara berulang. Jejak panjang Riza Chalid yang ditautkan dengan berbagai peristiwa dan jaringan lintas dekade menguatkan posisinya sebagai simpul dalam narasi oligarki migas bukan sekadar aktor Tunggal yang dinilai mampu memengaruhi kebijakan dan memanfaatkan infrastruktur negara sebagai instrumen rente (Dick & Mulholland, 2018).

Pembahasan

Pembahasan menunjukkan bahwa kasus Pertamina–Riza Chalid dapat dibaca sebagai contoh reproduksi oligarki energi di Indonesia. Riza tidak sekadar tampil sebagai figur individual, melainkan representasi kekuatan ekonomi-politik yang berulang kali diasosiasikan dengan intervensi tata kelola migas lintas rezim—mulai dari Zatapi, Petral, “Papa Minta Saham”, hingga isu OTM. Skema yang dipaparkan dalam podcast Tempo membentuk gambaran pola sistematis: kapasitas kilang diduga “dikondisikan” agar tidak menyerap maksimal, impor diposisikan sebagai kebutuhan yang seolah tidak terhindarkan, tender digambarkan “formalitas” agar hanya pemain tertentu yang masuk, serta muncul klaim manipulasi spesifikasi (misalnya pembayaran RON 92 namun barang datang RON 90) yang menghasilkan rente sekitar 13–15%. Dalam kerangka AWK Van Dijk, makrostruktur wacana yang dominan adalah tesis bahwa oligarki energi tidak runtuh, melainkan beradaptasi melalui “pergantian pemain”. Superstruktur episode menuntun audiens dari pembuka yang ringan menuju pengungkapan mekanisme rente dan jejaring aktor, sehingga alur penceritaan bekerja sebagai strategi persuasif bertahap. Sementara itu, mikrostruktur tampak pada pemilihan leksikon yang evaluatif dan bernada kritik seperti “oplosan”, “modus lama”, dan metafora “keluar mulut harimau masuk mulut buaya” yang berfungsi sebagai penanda sikap (*stance*) sekaligus bentuk resistensi simbolik terhadap normalisasi praktik rente. Pada ranah kognisi sosial, episode memanfaatkan *shared knowledge* audiens tentang Riza Chalid, Petral, dan “Papa Minta Saham” untuk mempercepat penerimaan argumen. Rujukan historis ini membuat narasi “aktor kuat yang sulit disentuh” terasa masuk akal tanpa perlu pembuktian panjang di

dalam teks. Penguatan juga datang dari konteks eksternal, seperti pernyataan Mahfud MD mengenai kuatnya “mafia minyak”, yang memperluas legitimasi sosial atas kerangka pikir bahwa persoalan migas berkaitan dengan jejaring elite yang melampaui institusi formal. Dari dimensi hukum, keberadaan instrumen formal (misalnya UU Migas No. 22/2001 dan Permendag No. 21/2019) serta tindakan penyitaan aset pada 2025 tidak otomatis dimaknai publik sebagai keadilan substantif. Wacana yang mengemuka justru memotret penegakan hukum sebagai kosmetik: aktor puncak dipersepsikan tetap lolos atau “menghilang”, sedangkan aktor yang lebih dekat ke level operasional ditangani lebih dahulu. Situasi ini sejalan dengan tesis Van Dijk bahwa wacana hukum dapat berfungsi ideologis bukan semata menegakkan aturan, tetapi juga menata persepsi publik tentang siapa yang tampak “bersalah” dan siapa yang tetap berada di luar jangkauan. Dampak sosial-ekonomi yang tersirat dalam wacana berupa *trust deficit* terhadap institusi, sinisme “ganti pemain, bukan sistem”, hingga artikulasi tuntutan kolektif (misalnya “17 + 8 Tuntutan Rakyat 2025”) (Detik Jabar, 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembenahan tata kelola migas tidak cukup berhenti pada penindakan individu. Reformasi perlu diarahkan pada struktur distribusi kekuasaan yang memungkinkan oligarki mempertahankan kepentingannya melalui kontrol simbolik, politik, ekonomi, dan praktik bahasa di ruang publik.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa podcast *Bocor Alus Politik* episode “Bedah Kasus Pertamina dan Jaringan Politik Riza Chalid” merepresentasikan politik oligarki di sektor migas sebagai relasi kekuasaan yang bekerja melampaui mekanisme institusi formal negara. Wacana yang dibangun tidak memposisikan Riza Chalid semata sebagai pelaku usaha, melainkan sebagai aktor politik informal yang dipotret memiliki kapasitas memengaruhi kebijakan energi melalui akses, jaringan, dan proteksi politik. Representasi tersebut menguatkan gambaran bahwa oligarki energi di Indonesia bersifat struktural, lintas rezim, serta ditopang jejaring kekuasaan yang berkelanjutan. Temuan ini mengonfirmasi asumsi penelitian bahwa wacana oligarki dalam kasus migas

tidak dapat direduksi menjadi isu teknis pengadaan atau impor minyak. Dalam perspektif Winters (2011), praktik yang diartikulasikan dalam podcast dapat dibaca sebagai bentuk *income defense*, yakni penggunaan kekuasaan politik untuk mempertahankan akumulasi serta distribusi kapital oleh segelintir elite. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas korpus dengan membandingkan wacana pada lintas episode dan lintas platform (misalnya YouTube, Spotify, Instagram, X/Twitter), agar terlihat variasi strategi naratif dan perubahan framing dari waktu ke waktu. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan fokus pada produksi konten jurnalisme investigatif digital, terutama bagaimana strategi redaksi, susunan narasi, dan pilihan diksi membangun kritik struktural tanpa terjebak pada populisme hukum.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Tempo Media Group yang telah membuka akses konten jurnalistik investigatif sehingga data empiris dalam penelitian ini dapat dianalisis secara akademik. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah menyediakan dokumen, data publik, rekaman digital dan arsip pemberitaan terkait kasus Riza Chalid dan sektor migas. Selain itu, penulis berterima kasih kepada keluarga, sahabat dan teman-teman penulis yang memberikan dukungan moril dan materiil selama proses penelitian berlangsung. Semua dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas.

6. Daftar Pustaka

- Akbar, J., & Wijaya, A. (2025, July 11). *Kronologi kasus korupsi migas Pertamina: Raja minyak Riza Chalid tersangka, kerugian negara capai Rp285 triliun*. Narasi TV.
- Anandya, D., Ramadhana, K., & Easter, L. (2022). *Laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021* (pp. 1–40). Indonesia Corruption Watch.
- CNN Indonesia. (2021). *WJP: Indeks negara hukum RI 2021 turun, peringkat 68 dari 139 negara*.
- Nge, H. J. (2018). Oligarki partai politik dalam rekrutmen calon kepala daerah. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(01), 59–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.42>.
- Nugroho, N. P. (2024). *HUT Aji ke-30, podcast Bocor Alus Politik Tempo terima Udin AWARD*. Tempo.co.
- Nurrohmah, A., & Setiawati, E. (2025). Ideologi wacana korupsi dalam pemberitaan kasus korupsi PT Timah pada portal berita Tempo.co. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(1), 157–170. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i1.1133>.
- Pebrianto, F. (2025). *Fajar Pebrianto—Journalist at Tempo Media Group*. The Org.
- Purnomo, H. (2025, July 11). *Pertamina bicara kasus tata kelola minyak yang menyeret Riza Chalid*. Finance Detik.
- Raditya, I. N. (2019, September 12). *Sejarah Petral: Dugaan proyek Pertamina, Cendana, & mafia migas*. Tirto.id.
- Risvandi, & Andri, A. (2022). Teori kekuasaan. *Yudabiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 119–128.
- Simanjuntak, C. C., & Kahija, Y. F. La. (2023). Interpretative phenomenological analysis tentang pengalaman single mother pascakematian suami. *Jurnal Empati*, 12(5), 386–391. <https://doi.org/10.14710/empati.2023.29043>.
- Tempo.co. (2023, December 3). *Mengapa kami membuat Bocor Alus*. Tempo.
- Tutiasri, R. P., Kurniawan, L. N., & Nazri, K. (2020). Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan*, 2(2). <https://doi.org/10.31599/wqb46v14>.

- VOI.id. (2025). *Profil Rizal Chalid, saudagar minyak yang ikut terseret kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina*.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yusri, & Mahuli, J. I. (2023). Dampak negara dikendalikan partai politik dan oligarki. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(2), 78–84.